



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

EDISI XXI

Periode 1 - 13 Agustus 2021

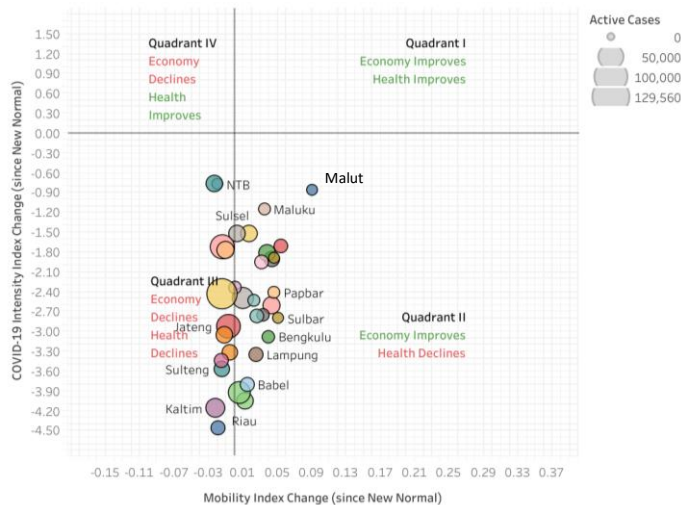
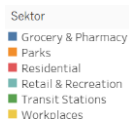
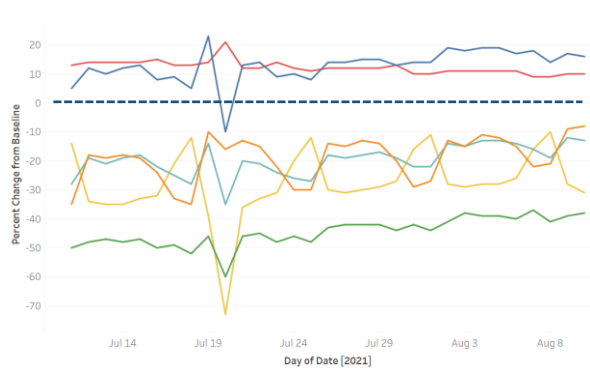
LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH



Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo • Miftah Chalamsa
Adrian Purnama Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring
Desy Pujipta A • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa • Khishbatur Rizqiyah



KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH

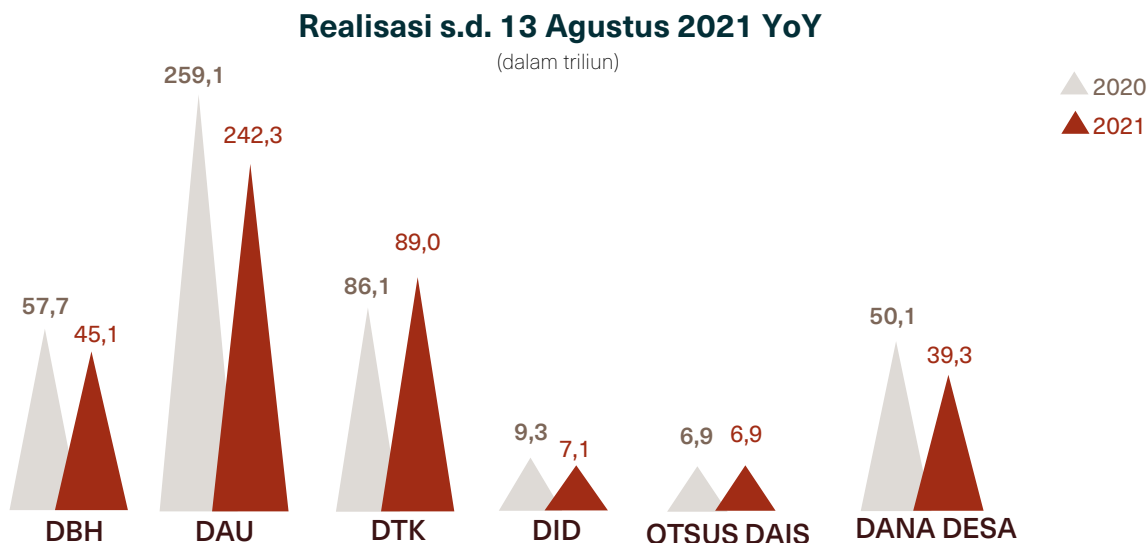


- Aktivitas perekonomian selama 11 Juli s.d. 10 Agustus, berdasarkan mobility index*, terlihat hanya di *grocery & pharmacy* dan residential yang masih meningkat dibandingkan baseline.
- Berdasarkan analisis kuadran dengan menggunakan variabel mobility index dan COVID-19 intensity index change* per 11 Agustus 2021, terlihat bahwa seluruh wilayah mengalami penurunan kondisi kesehatan seiring meningkatkan kasus COVID-19 akhir-akhir ini. Untuk mobility index, hampir seluruh wilayah mendekati di garis baseline, kecuali Maluku Utara yang cukup tinggi peningkatan mobility index-nya.

► *Data google mobility dan CSIS

KINERJA TKDD DAERAH

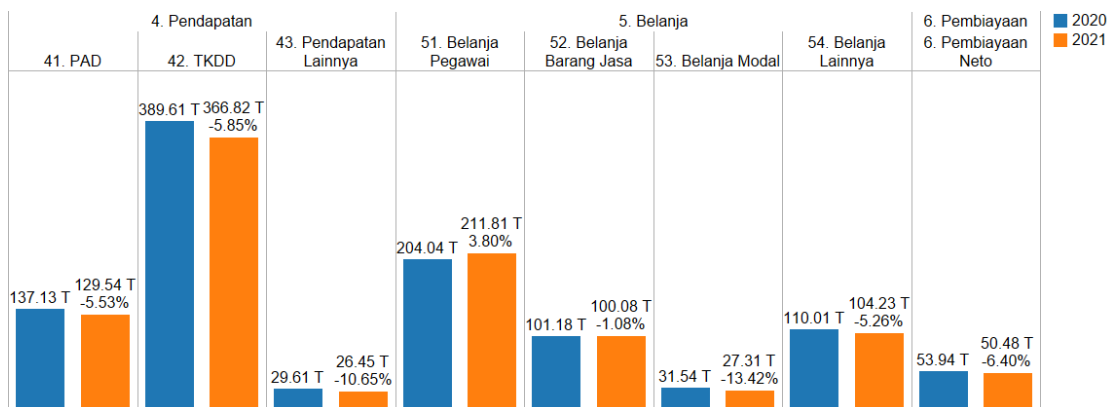
Realisasi TKDD 2021 s.d. 13 Agustus 2021



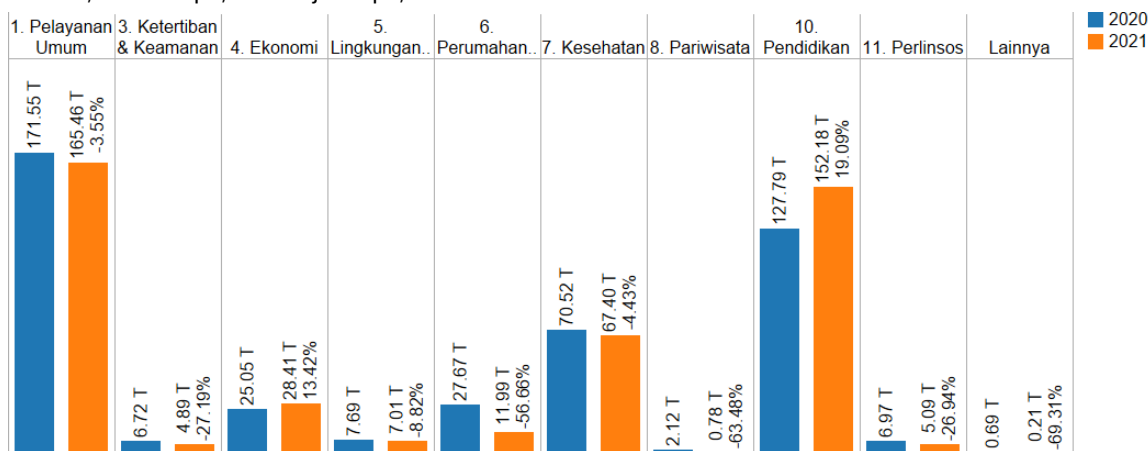
- Secara YoY, realisasi TKDD s.d. **13 Agustus 2021** sebesar Rp429,8 T mengalami **penurunan 8,4%** dibandingkan realisasi s.d. 13 Agustus 2020 sebesar Rp469,2 T.
- **DAU mengalami penurunan sebesar 6,5%** akibat adanya penambahan persyaratan kinerja mulai DAU Februari 2021. **DBH mengalami penurunan sebesar 21,7%**, **DTK naik 3,3%**, dan **Dana Desa menurun sebesar 21,5%**.
- Realisasi BLT sebesar Rp12,38 T (**42,98%** dari target) disalurkan kepada 5,50 juta KPM (**68,72%** dari target KPM).

KINERJA FISKAL DAERAH

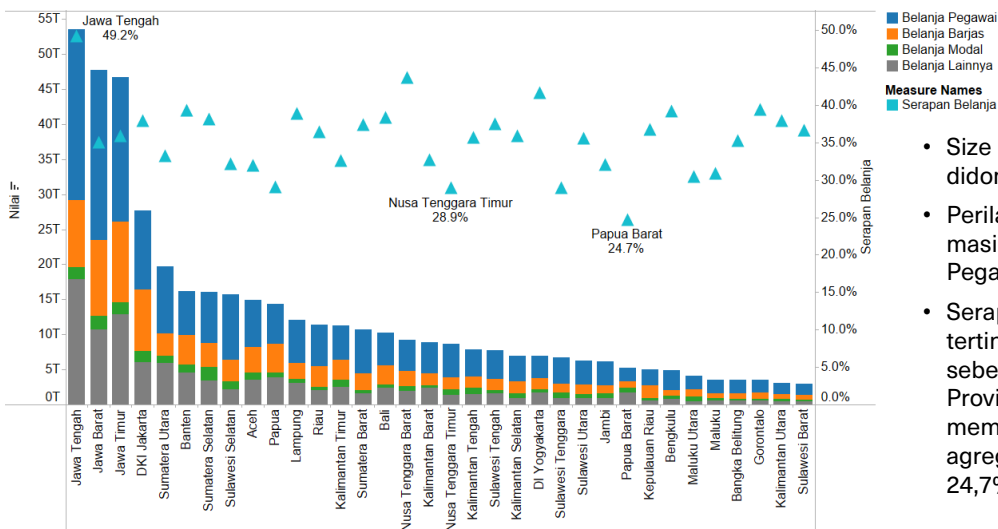
Realisasi APBD s.d. Juli - YoY



- Realisasi Pendapatan 2021 terkontraksi sebesar 6,0% secara YoY dari Rp554,5 T menjadi Rp521,1 T. Penurunan terbesar di Pendapatan Lainnya meskipun nilainya tidak terlalu signifikan. Penurunan di PAD dan TKDD berturut-turut sebesar 5,5% dan 5,9%.
- Realisasi Belanja 2021 terkontraksi sebesar 0,8% secara YoY dari Rp445,5 T menjadi Rp441,9 T, dengan penurunan tertinggi di Belanja Modal 13,4%.
- Pembiayaan Neto turun sebesar 6,4% secara YoY yang sumber utamanya adalah penurunan di Penggunaan SILPA TA Sebelumnya sebesar 7,8% dari Rp56,1 T menjadi Rp51,7 T, sedangkan Penerimaan Pinjaman justru naik sebesar 135,0% dari Rp1,1 T menjadi Rp2,6 T.



- Fungsi yang mengalami penurunan realisasi terbesar adalah Pariwisata sebesar 63,5% dan Perumahan & Fasum sebesar 56,7%.
- Fungsi Pendidikan dan Ekonomi mengalami peningkatan realisasi secara YoY, yaitu berturut-turut naik 19,1% dan 13,4%.

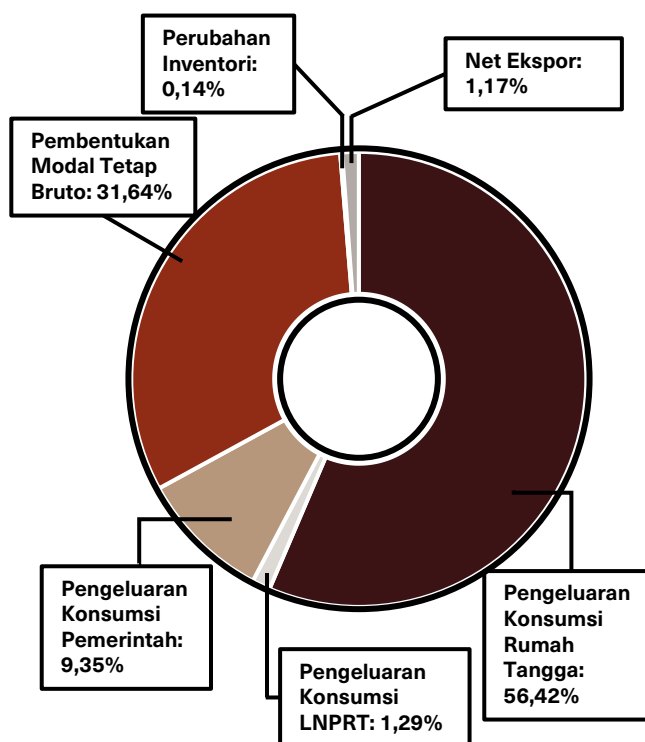


- Size realisasi belanja masih didominasi dari Pulau Jawa.
- Perilaku belanja s.d. Mei 2021 masih didominasi oleh Belanja Pegawai.
- Serapan belanja secara agregat tertinggi ada di Provinsi Jateng sebesar 49,2%, sedangkan Provinsi Papua Barat dan NTT mempunyai serapan belanja agregat terendah sebesar 24,7% dan 28,9%.

KINERJA BELANJA

Pada tahun 2020, distribusi besaran pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap PDRB mencapai 9,35%. Meskipun kontribusi besaran pengeluaran pemerintah tidak sebesar konsumsi rumah tangga (56,42%) dan pembentukan modal tetap bruto (31,64%), namun pengeluaran yang dilakukan pemerintah akan mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian. Adanya pengeluaran pemerintah secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa, misalnya melalui pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan produksi. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi BBM misalnya, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020



Bagi sebagian daerah, pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki kontribusi yang signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian daerahnya. Berikut adalah lima besar terbesar dan terendah kontribusi pengeluaran daerah terhadap PDRB seprovinsinya di Tahun 2020.



Provinsi dengan Tingkat Kontribusi Pengeluaran Daerah Terhadap PDRB Tertinggi

1. Maluku	36,18%
2. Maluku Utara	27,69%
3. Nusa Tenggara Timur	25,86%
4. Papua	22,17%
5. Aceh	21,22%



Provinsi dengan Tingkat Kontribusi Pengeluaran Daerah Terhadap PDRB Terendah

1. Jawa Barat	5,68%
2. Jawa Timur	5,65%
3. Riau	4,50%
4. Banten	4,36%
5. Kalimantan Timur	4,31%

KINERJA BELANJA

Pada 2021, meski ditengah tekanan fiskal akibat dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah tetap mengalokasikan APBD TA 2021 untuk berbagai fungsi dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Fungsi paling dominan adalah **Pelayanan Umum (35,32%)**, **Pendidikan (28,83%)**, dan **Kesehatan (15,68%)**. Hal ini selaras dengan fungsi utama yang diemban oleh Pemerintah Daerah yakni ujung tombak layanan publik di daerah.

Fungsi	% Distribusi
Pelayanan Umum	35,32%
Ketertiban dan Keamanan	1,06%
Ekonomi	10,53%
Lingkungan Hidup	2,64%
Perumahan dan Fasilitas Umum	4,71%
Kesehatan	15,68%
Pariwisata	0,28%
Pendidikan	28,83%
Perlindungan Sosial	0,94%
Fungsi Lainnya	0,01%

Peringkat Daerah pada Fungsi Pelayanan Umum

TOP 5	Daerah	Persentase
1.	Kab. Barru	70,80%
2.	Kab. Nduga	70,23%
3.	Kab. Lanny Jaya	69,17%
4.	Kab. Puncak Jaya	67,31%
5.	Kab. Tambraw	66,44%

BOTTOM 5	Daerah	Persentase
1.	Provinsi Papua	16,8%
2.	Kota Jambi	18,7%
3.	Provinsi DKI Jakarta	19,0%
4.	Kota Singkawang	19,7%
5.	Kab. Pinrang	19,9%

Peringkat Daerah pada Fungsi Pendidikan

TOP 5	Daerah	Persentase
1.	Prov. Sumatera Utara	47,02%
2.	Prov. Sumatera Barat	46,00%
3.	Prov. Jawa Tengah	43,63%
4.	Prov. DI Yogyakarta	43,59%
5.	Prov. Jawa Timur	41,67%

BOTTOM 5	Daerah	Persentase
1.	Kab. Pangkajene Kep.	5,17%
2.	Kab. Puncak	6,66%
3.	Kab. Barru	6,90%
4.	Kab. Yalimo	7,04%
5.	Kab. Intan Jaya	8,75%

Peringkat Daerah pada Fungsi Kesehatan

TOP 5	Daerah	Persentase
1.	Prov. Maluku Utara	38,64%
2.	Kota Tanjung Balai	37,82%
3.	Kota Sukabumi	37,48%
4.	Kota Cirebon	34,33%
5.	Kab. Hulu Sungai Utara	31,99%

BOTTOM 5	Daerah	Persentase
1.	Prov. Papua Barat	3,21%
2.	Prov. DI Yogyakarta	4,17%
3.	Prov. Sumatera Selatan	4,60%
4.	Prov. Jawa Barat	5,47%
5.	Prov. Bali	5,68%

Sumber: APBD TA 2021 (djpk.kemenkeu.go.id diolah)

KINERJA BELANJA

Sedangkan jika dilihat dari jenis belanja, maka belanja daerah masih didominasi oleh **belanja operasi** yang utamanya berasal dari **belanja pegawai** dan **belanja barang/jasa**. Secara rata-rata alokasi belanja operasi pada tahun 2021 adalah **67,94%** dari total belanja APBD TA 2021.

Jenis Belanja	Persentase Terhadap Total Belanja
Belanja Operasi	67.94%
Belanja Pegawai	36.82%
Belanja Barang Jasa	26.98%
Belanja Lainnya	4.13%
Belanja Modal	17.10%
Belanja Tidak Terduga	0.84%
Belanja Transfer	14.12%
Total	100%

► Rasio Jenis Belanja terhadap total belanja (APBD TA 2021)

Peringkat Daerah pada Kategori Belanja Pegawai



TOP 5



1. Kota Bengkulu	54,68%
2. Kab. Cirebon	52,47%
3. Kota Palangkaraya	52,42%
4. Kab. Sragen	52,38%
5. Kota Binjai	52,11%

BOTTOM 5



1. Prov. Banten	11,9%
2. Prov. Papua Barat	12,4%
3. Kab. Tambrau	14,7%
4. Prov. Jawa Barat	15,4%
5. Kab. Mahakam Ulu	15,6%

Peringkat Daerah pada Kategori Belanja Barang/Jasa



TOP 5



1. Prov. Kepulauan Riau	52,31%
2. Kab. Peg. Arfak	51,61%
3. Kota Blitar	46,68%
4. Kota Tangerang	46,31%
5. Kota Surabaya	46,15%

BOTTOM 5



1. Kab. Padang Lawas Utara	14,14%
2. Kab. Barito Utara	14,27%
3. Kab. Aceh Barat	14,66%
4. Prov. Sulawesi Tenggara	15,50%
5. Kota Kendari	15,97%

Peringkat Daerah pada Kategori Belanja Modal



TOP 5



1. Kab. Halmahera Tengah	42,16%
2. Kab. Muna	40,57%
3. Kota Kendari	40,51%
4. Kab. Enrekang	40,47%
5. Prov. Maluku Utara	40,11%

BOTTOM 5



1. Kab. Badung	3,69%
2. Kota Denpasar	4,23%
3. Kab. Sumedang	5,27%
4. Kota Kediri	5,71%
5. Prov. Jambi	5,79%

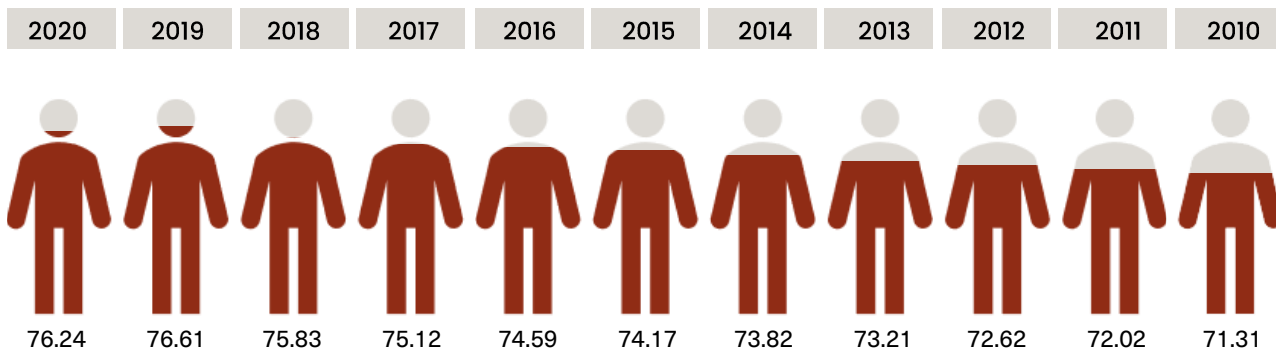
INOVASI DAERAH

INOVASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. APBD memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Sebagai kebijakan, APBD memiliki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Di tengah situasi pandemi sekarang ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berkomitmen memenuhi *mandatory spending* yaitu *earmarked* 8% DAU/DBH untuk penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19, belanja kesehatan lainnya, dan kegiatan prioritas. Total anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp231.186.491.762,- (26.69% DAU/DBH) dengan realisasi penyerapan s.d. bulan Juli 2021 sebesar Rp232.853.925.371,- (Realisasi sebesar 100.72%).



Pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim telah berjalan dengan sangat baik bahkan telah berhasil meraih predikat WTP sebanyak 8 kali (dimana 6 kali diraih secara berurutan) dan bahkan masuk dalam salah satu capaian provinsi terbaik di Indonesia. Bukti keberhasilan tersebut adalah adanya outcome berupa capaian indikator kemakmuran yaitu kemiskinan, pengangguran, gini rasio dan empat indikator lain yang capaiannya di atas rata-rata nasional. Kondisi pandemi memang membuat kemiskinan dan pengangguran mengalami kenaikan, akan tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim masih menunjukkan posisi yang baik, yaitu peringkat tiga di tingkat nasional.



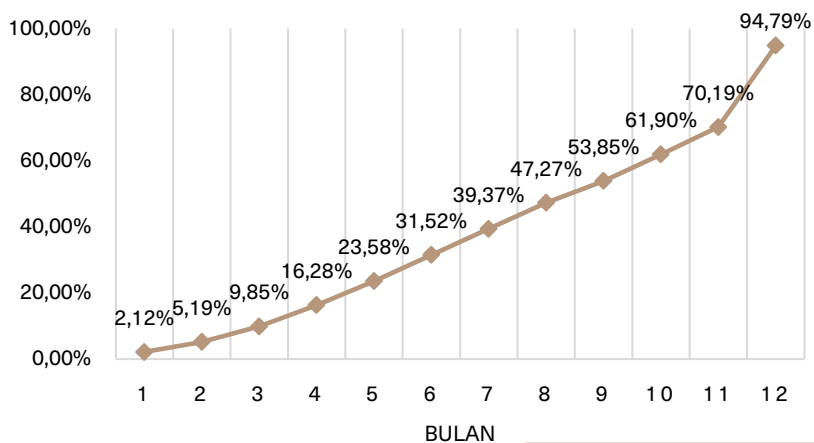
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Prestasi lain yang tidak kalah penting dari Prov. Kaltim adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara pelayanan publik telah mewujudkan inovasi baru berupa peningkatan pelayanan yang dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Beberapa inovasi tersebut adalah Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada pelayanan Samsat Kota Balikpapan, Pelayanan BPKB Ditlintas Polda Kalimantan Timur, Pelaksanaan Ujian Teori Penerbitan SIM dengan sistem AVIS/DTMS, Pelayanan Gerai Samsat Corner di Mall Balikpapan, Trade Centre dan Mall Samarinda Central Plaza, Pembangunan tujuh Samsat Pembantu di wilayah Kalimantan Timur, Drive Thru Samsat Samarinda, SIM Corner di Samarinda Central Plaza. Inovasi yang telah dilaksanakan tersebut telah dapat meningkatkan PAD dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Atas prestasi dan inovasi yang telah dilakukan Pemprov Kaltim dalam dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut di tahun 2020, akhirnya Pemprov Kaltim memperoleh **penghargaan dari Kementerian Keuangan berupa Dana Insentif Daerah (DID)** untuk kategori kemandirian daerah, pemenuhan *mandatory spending*, peningkatan investasi daerah dan kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Prinsip *money follows function* dalam pelaksanaan desentralisasi banyak diartikan bahwa Pemerintah Pusat harus memastikan pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai penyediaan layanan publik di daerah. Dalam hal ini, pemerintah memberikan penugasan untuk memungut pajak (*revenue assignment*) kepada daerah. Namun demikian, di dalam kondisi tertentu seperti adanya ketidakseimbangan potensi pendapatan, pemerintah daerah tidak mungkin dapat memenuhi peran mereka dalam belanja daerah untuk pelayanan publik melalui pendapatan asli daerah. Peran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi krusial dalam menangani isu-isu tersebut dimana TKD digunakan sebagai alat untuk redistribusi pendapatan baik dari individu kaya ke individu yang lebih miskin dan dari daerah kaya ke daerah miskin. Pendekatan-pendekatan inilah yang mendasari pilihan Indonesia untuk menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih menitikberatkan pada *expenditure assignment* dibandingkan dengan *revenue assignment*. Sidik dan Kadjatkiko (2004) menyatakan kombinasi pendekatan yang lebih dominan kepada desentralisasi belanja tersebut disebut dengan "*expenditure-led*" approach dalam teori desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, desentralisasi yang lebih menitikberatkan pada diskresi untuk belanja, maka kemampuan daerah untuk mengelola belanja menjadi salah satu kunci yang menentukan sukses tidaknya kebijakan desentralisasi fiskal.

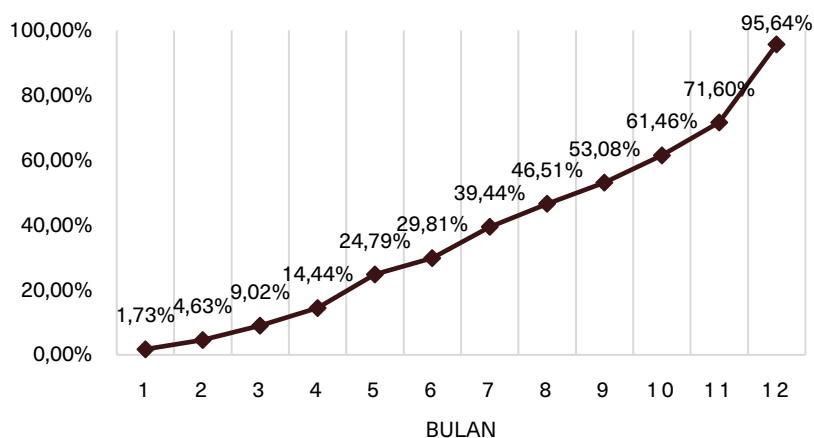
Realisasi Belanja Tahun 2018



Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi belanja daerah menunjukkan pola yang sama. Jika dilihat dari data 2018, realisasi belanja sangat lambat di semester pertama tahun berjalan. Sampai dengan bulan Juni, realisasi belanja menunjukkan angka 31,52%. Di satu sisi realisasi pendapatan sudah mendekati 50%. Realisasi belanja menjadi ekspansif setelah memasuki bulan November, dimana daerah merealisasikan belanjanya sebesar 70,19% dan menyelesaikannya sebesar 94,75% di akhir tahun.

Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2019. Pada akhir semester pertama realisasi belanja lebih rendah, yaitu di kisaran 29%, sementara realisasi pendapatan telah mencapai 43,46%. Belanja juga mulai ekspansif pada periode akhir kuartal ke empat, sebagaimana terjadi pula di tahun sebelumnya. Konsisten dengan data tersebut, semakin menguatkan adanya fenomena dana *idle* yang terjadi di daerah. Data menunjukkan bahwa semester pertama tahun berjalan, besaran dana idle di daerah mencapai hampir Rp 200 Triliun.

Realisasi Belanja Tahun 2019



Pola Belanja Daerah Pasca Pandemi

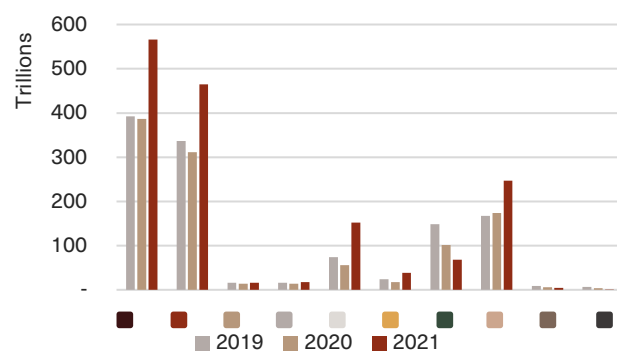
Terjadinya pandemi covid-19 telah memaksa Pemerintah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran. Dengan diterbitkannya Perppu No 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi UU No 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menanggapi Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah mengambil langkah signifikan dalam memutar haluan kebijakan keuangan dan hal tersebut juga berdampak bagi Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, diterbitkanlah Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD TA 2020 Dalam rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Peraturan Bersama dua Menteri tersebut mengamankan agar dilakukan rasionalisasi terhadap: (1) belanja pegawai khususnya tunjangan yang melebihi pegawai pusat, honorarium kegiatan, uang kembur, dan lain-lain yang dilakukan secara sangat selektif; (2) mengurangi 50% belanja barang jasa seperti perjalanan dinas, percetakan, pemeliharaan, sewa, kegiatan sosialisasi, dan lain-lain; (3) mengurangi 50% belanja modal seperti untuk pengadaan kendaraan dinas, pembangunan Gedung, pengadaan meubelair, dan infrastruktur lainnya yang bisa ditunda hingga tahun 2021. Lebih lanjut, penghematan atau rasionalisasi tersebut digunakan untuk: (1) belanja bidang kesehatan dan hal-hal yang terkait dengan pencegahan dan penanganan pandemi; (2) pemberian bansos kepada masyarakat miskin; (3) penguatan ekonomi terutama kepada UMKM dan koperasi.

Belum selesai sampai disitu, untuk anggaran tahun 2021 juga dilakukan penguatan penanganan dampak pandemi COVID-19 dengan terbitnya PMK 17/2021 yang antara lain mengatur antara lain: (1) 25% dari Dana Transfer Umum difokuskan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan (2) 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan untuk menyediakan dukungan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19.

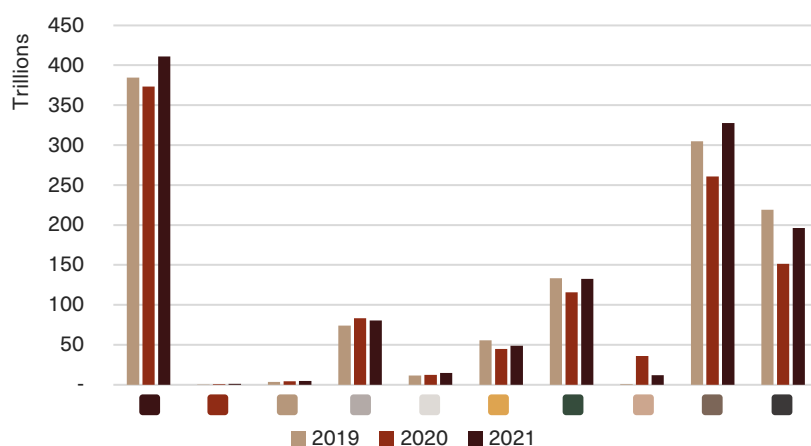
- Pelayanan Umum
- Pendidikan
- Perlindungan Sosial
- Ketertiban
- Ekonomi
- Lingkungan Hidup
- Perumahan dan Fasum
- Kesehatan
- Pariwisata
- Lainnya

●● Trend Belanja per Fungsi Tahun 2019-2021



Bila kita mengacu pada pengaturan-pengaturan di atas, maka kita akan membayangkan bahwa belanja sektor kesehatan dan perlindungan sosial akan naik secara signifikan, dan realisasi belanja akan dilakukan dengan cepat. Data menunjukkan hal berbeda, untuk belanja kesehatan (belanja per fungsi) memang menunjukkan kenaikan yang signifikan, namun untuk belanja perlintsos (belanja per jenis) dan Belanja Bantuan Sosial (belanja per jenis belanja), tidak menunjukkan perubahan yang signifikan sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa grafik di bawah ini.

●● Trend Belanja per Jenis Belanja Tahun 2019-2021



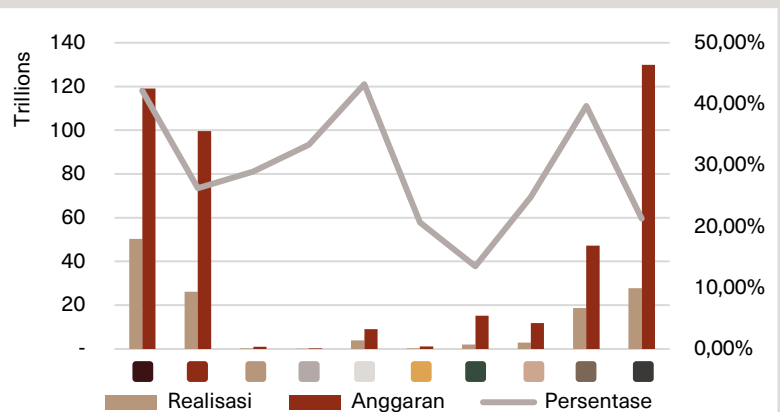
- Belanja Pegawai
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bagi Hasil
- Belanja Bantuan Keuangan
- Belanja Tidak Terduga
- Belanja Barang Jasa
- Belanja Modal

Tantangan

Bila dilihat pola pelaksanaan Belanja di tahun 2021, masih terlihat seperti tahun-tahun sebelumnya. Hingga semester 1, realisasi seluruh jenis belanja masih jauh di bawah 50%, yang berpotensi pada lambatnya upaya pemulihan perekonomian daerah.

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Modal Tanah
- Belanja Tidak Terduga
- Belanja Bagi Hasil
- Belanja Bantuan Keuangan

● ● Progress Realisasi Belanja Semester 1 Tahun 2021



Pandemi Covid yang telah berlangsung lebih dari setahun menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan memperoleh pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga penerimaan PAD turun dan menggantungkan pendapatannya dari transfer ke daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Di sisi lain, pemerintah pusat juga mengalami kesulitan keuangan akibat dari semakin menurunnya penerimaan negara dari pajak, sedangkan beban belanja negara semakin bertambah untuk mendanai program pemulihan ekonomi nasional termasuk belanja kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid dan program perlindungan sosial. Semakin meningkatnya belanja negara namun penerimaan negara semakin berkurang, membuat pemerintah pusat melakukan refocusing belanja negara dan transfer ke daerah.

Rekomendasi

Belanja daerah daerah yang tepat dapat mendukung terlaksananya pelayanan publik yang baik di daerah. Dalam refocusing penggunaan TKD, 8% dari Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil diprioritaskan untuk program kesehatan di daerah. Hal ini untuk membantu penanganan pandemi Covid di daerah. Percepatan belanja daerah sangat dibutuhkan dalam masa pandemi supaya masyarakat dapat lebih cepat memperoleh pelayanan kesehatan dan pandemi covid tidak menyebar di daerah. Namun demikian, progres realisasi belanja daerah pada semester I masih di bawah 50%. Rendahnya realisasi belanja daerah dapat mempengaruhi proses pemulihan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan dalam rangka refocusing belanja daerah.

Di samping itu, masyarakat yang terdampak oleh pandemi covid juga dapat terbantu oleh program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial. Program bantuan sosial sangat diperlukan oleh penduduk miskin dan masyarakat yang terdampak PHK atau tidak bisa beraktivitas karena adanya pembatasan, baik skala besar maupun mikro. Oleh karena itu, dalam masa pandemi (krisis) Pemda perlu lebih memprioritaskan anggaran untuk pemulihan ekonomi melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, selama ini masih banyak pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi ditengarai masih menyimpan dana transfer daerah maupun dari sumber pendapatan lainnya di perbankan. Simpanan Pemda di perbankan diperkirakan masih tinggi. Tercatat bahwa per Juni 2021, dana pemerintah daerah yang terparkir di bank mencapai Rp190,13 triliun. Oleh karena itu, pemda diharapkan mengurangi simpanan di perbankan dan menggunakan dana tersebut untuk belanja daerah.

Belanja Daerah di Era Pandemi Covid



Pemerintah Kabupaten Cirebon

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon segera merealisasikan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2021 karena berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 27 Juli 2021, **realisasi belanja Pemkab Cirebon baru menyentuh angka 30,28 persen**, sementara realisasi pendapatannya baru 41,37 persen dengan harapan ada uang yang beredar di masyarakat, kalau bisa targetnya 40-50 persen. Kemendagri juga meminta agar penyerapan belanja pemerintah daerah dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mempercepat penyerapan belanja pemerintah daerah, terutama belanja modal, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal dua tahun 2021. Uang yang beredar di masyarakat akan memancing swasta, dan kemudian terjadi peredaran uang di masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga ekonomi bisa tetap bertahan.

<https://nasional.kompas.com> (Diunduh 30 Juli 2021)

Pemerintah Kota Tangerang



Setelah rapat koordinasi di Tangerang Selatan (Tangsel), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengapresiasi **Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel telah merealisasikan anggaran insentif tenaga kesehatan daerah hampir 100 persen**. Sebab, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19 sehingga pemenuhan haknya harus segera direalisasikan. Mendagri juga memberikan apresiasi pada Pemkot Depok yang juga telah merealisasikan insentif tenaga kesehatan daerah sebesar 100 persen. Menurut Mendagri, Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan insentif tenaga kesehatan yang telah dianggarkan dan dituangkan dalam komponen dana alokasi umum (DAU) di daerah-daerah. Dananya pun sudah ditransfer oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu, tanggung jawab pencairan insentif nakes kini berada di tangan pemda.

<https://nasional.kompas.com> (Diunduh 30 Juli 2021)



Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 mencapai 43,01 persen. Capaian realisasi anggaran belanja tahun 2021 ini lebih tinggi 12,9 persen dibandingkan tahun 2020 lalu sebesar 30,02 persen. Gubernur Jawa Timur menegaskan, *government spending* atau belanja daerah didorong dan diandalkan di masa pandemi Covid-19, dan terutama masa PPKM agar menjaga roda ekonomi daerah terus berjalan. Belanja APBD penting, untuk men-drive ekonomi daerah dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan juga PPKM Darurat. Hingga tanggal 23 Juli 2021, Pemprov Jatim telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 446,5 miliar untuk penanganan Covid-19. Realisasi belanja tersebut telah mencapai 58,03 persen dari target alokasi belanja daerah untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 769,5 miliar. Yang terinci untuk penanganan Covid-19 telah terbelanjakan sebesar Rp 166,6 miliar atau 113,9 persen dari target alokasi Rp 145,2 miliar. Kemudian juga belanja dukungan vaksin sebesar Rp 5,2 miliar atau 100 persen dari target anggaran yang dialokasikan. Tahun 2021 ini, anggaran APBD Pemprov Jatim juga dibelanjakan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan. Sejauh ini, dana insentif nakes telah terealisasi sebesar Rp 132,05 miliar atau 62,08 persen dari target Rp 212,7 miliar. Belanja kesehatan telah terealisasi sebesar Rp 142,6 miliar atau 35,19 persen dari target alokasi Rp 405,3 miliar. Dalam penanganan pandemi covid-19, Pemprov Jatim juga menggunakan belanja tak terduga (BTT) guna memaksimalkan upaya meminimalisir dampak pandemi.

<https://jatim.tribunnews.com> (Diunduh 29 Juli 2021)

Belanja Daerah di Era Pandemi Covid

Pemerintah Kota Cirebon



Kota Cirebon mencatatkan “surplus APBD Tahun Anggaran 2020” saat pandemi Covid-19 belum usai. Realisasi pendapatan Kota Cirebon pada tahun 2020 melebihi realisasi belanja, sebagaimana terungkap saat Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon Dalam Rangka Persetujuan atau Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Kota Cirebon Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD Kota Cirebon, Rabu, 28 Juli 2021. **Realisasi pendapatannya lebih dari Rp1,6 triliun dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp437 miliar, Pendapatan Transfer sekitar Rp1,4 triliun, Bantuan Keuangan sekitar Rp209 miliar, dan lain - lain pendapatan yang sah sekitar Rp56 miliar.** Pendapatan transfer sendiri masing - masing terdiri dari pendapatan transfer pusat sekitar Rp817 miliar, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya sekitar Rp31 miliar, dan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya sekitar Rp81 miliar. Sementara, realisasi belanja Kota Cirebon pada tahun 2020 sekitar Rp1,5 triliun yang meliputi belanja operasi sekitar Rp1,2 triliun, belanja modal sekitar Rp294 miliar, dan belanja tak terduga sekitar Rp41 miliar. Kondisi tersebut memunculkan surplus sekitar Rp51 miliar. Sepanjang tahun yang sama, Kota Cirebon mencatatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sekitar Rp49 miliar.

<https://www.ayocirebon.com> (Diunduh 29 Juli 2021)



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD DKI Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan di rapat paripurna DPRD DKI, Wakil Gubernur DKI menyampaikan bahwa **DKI telah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19** di antaranya melalui perubahan anggaran belanja tidak terduga dari Rp188.90 miliar menjadi Rp5,52 triliun. Dari nilai Rp5,52 triliun tersebut, **DKI hanya merealisasikan penggunaannya sekitar 85,27 persen atau Rp4,70 triliun.** Uang tersebut digunakan untuk realisasi bidang kesehatan Rp 918,61 miliar, dan jaring pengaman sosial sebesar Rp3,78 triliun.

<https://www.liputan6.com> (Diunduh 27 Juli 2021)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Serapan Dana Desa (DD) 2021 di Jawa Tengah mencapai 54 persen. Selain itu, desa-desa di Jateng juga telah mengalokasikan 8 persen dari DD untuk penanggulangan Covid-19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng mengatakan bahwa serapan DD di Jawa Tengah cukup tinggi, dari 7.809 desa untuk dana desa (tahun 2021) serapannya sudah 54,54 persen dibandingkan dengan tataran nasional yang kurang lebih 42 persen. Terkait penggunaan DD untuk penanggulangan Covid-19, desa-desa di Jateng telah menunaikan kewajibannya. DD 8 persen penanggulangan Covid-19 sangat bervariasi seperti pengaman dari Covid, pemulasaraan jenazah, pemakaman, dukungan logistik bagi yang isolasi mandiri.

<https://semarang.bisnis.com> (Diunduh 30 Juli 2021)



Tingkat Belanja Pegawai Berbagai Daerah

Pada Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (24/5/2021), **Menteri Keuangan, membeberkan beberapa daerah yang belanja pegawainya masih lebih tinggi dibanding belanja modal.** Belanja pegawai yang cukup tinggi di beberapa daerah membuat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang digemakan pemerintah pusat tidak maksimal. Menteri Keuangan merinci, rata-rata belanja pegawai di tingkat provinsi mencapai 27 persen. Belanja pegawai di 14 provinsi sudah lebih rendah dari rata-rata, namun mayoritas masih di atas rata-rata sebesar 27,6 persen. Bangka Belitung menjadi salah satu provinsi dengan belanja pegawai tertinggi mencapai 36 persen. Sedangkan Jawa Barat menjadi yang terendah, yakni 21,4 persen. Di tingkat Kabupaten, rata-rata belanja pegawai untuk membayar gaji mencapai 35,3 persen. Tercatat 189 Pemda sudah lebih rendah, namun ada 30 Pemda yang masih di atas rata-rata. Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur menjadi kabupaten dengan belanja pegawai paling tinggi. Sementara di tingkat kota, rata-rata belanja pegawai mencapai 35,7 persen. Kota Blitar, Jawa Timur menjadi yang paling rendah dengan persentase 27 persen. Tapi Kota Pematang Siantar, Medan, menjadi kota dengan belanja pegawai paling tinggi.

<https://money.kompas.com> (Diunduh 30 Juli 2021)

Belanja Daerah di Era Pandemi Covid



Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Untuk meringankan beban warga akibat dampak pandemi COVID-19 serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, **Pemprov Jatim terus menggelontorkan bantuan sosial (bansos) untuk warga. Hingga 23 Juli 2021, Pemprov Jatim telah merealisasikan bansos sebesar Rp46,49 miliar atau baru mencapai 37,57% dari target alokasi bansos sebesar Rp123,7 miliar.** Sedangkan realisasi belanja bansos tahun 2021 oleh kabupaten kota se-Jatim telah mencapai Rp220,6 miliar. Gubernur Jawa Timur terlibat langsung dalam melakukan penyisiran langsung ke masyarakat yang tidak teridentifikasi sebagai penerima bansos dan juga membagikan 250 paket bantuan untuk warga yang tinggal di bawah jembatan layang yang dikenal kampung 1001 malam di Kelurahan Moro Krembangan dan Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Keterlibatan gubernur Jatim secara langsung pada pemberian bantuan sembako di kedua kelurahan tersebut dikarenakan banyak warga yang ditemui tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial karena tidak terdata sebagai warga setempat.

<https://daerah.sindonews.com> (Diunduh 30 Juli 2021)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat



Langkah Gubernur Jawa Barat menggeser alokasi anggaran 11 proyek infrastruktur untuk pembelian obat dan suplemen gratis bagi pasien isolasi mandiri menuai apresiasi karena berani mengorbankan anggaran untuk sesuatu yang lebih darurat. Menurut Ekonom *Senior Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia, langkah ini sebagai kebijakan yang cerdas yaitu bisa berpikir cepat, sehingga bisa memilah prioritas dan tingkat kepentingan di masa darurat COVID-19, apalagi pemerintah daerah tidak mungkin lagi meminta bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Anggaran ini untuk mengatasi melonjaknya angka kasus positif COVID-19 dan menipisnya ketersediaan ruang perawatan, oksigen, dan obat-obatan serta untuk mensubsidi gratis obat-obatan pasien COVID-19 yang isolasi mandiri. Warga yang mengajukan akan mendapatkan bantuan obat dan suplemen gratis dari Pemerintah Provinsi Jabar.

<https://daerah.sindonews.com> (Diunduh 30 Juli 2021)



Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan DPRD DIY sepakat mengalokasikan Rp 50 juta dari Dana Keistimewaan (Danais) untuk tiap desa. Dana tersebut dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Anggaran Rp 50 juta ini, diserahkan pengelolannya ke masing-masing desa dan pemanfaatannya di tiap desa di DIY ini berbeda dengan pemanfaatan dari APBN dan APBDesa. Saat ini anggaran APBD DIY untuk penanggulangan COVID sebesar Rp 326 miliar, sudah terserap sebesar Rp 140,9 miliar atau 41 persen dan targetnya adalah bantuan sosial (bansos) stimulan untuk koperasi di DIY bisa segera dicairkan. Penyaluran dana bansos bagi warga terdampak pandemi tengah didata masing-masing OPD di DIY, diantaranya Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), dan OPD lain yang berhubungan dengan masyarakat.

<https://news.detik.com> (Diunduh 30 Juli 2021)



Analisis Vector Autoregression Pengaruh Pola Penyaluran TKDD Terhadap Realisasi Belanja Daerah

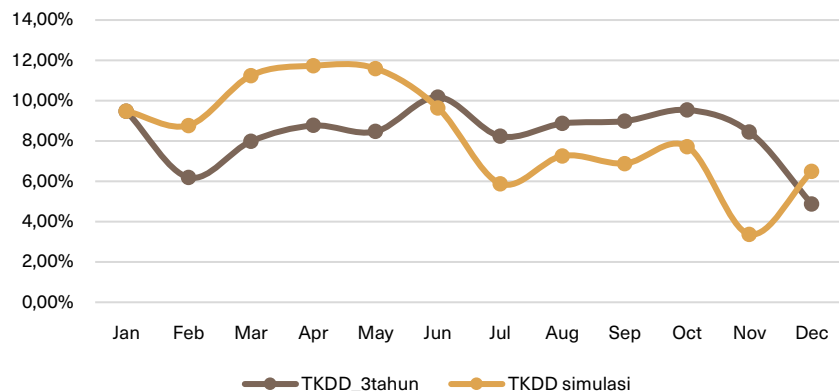


Pola Belanja pemerintah daerah cenderung tidak berubah dalam bertahun-tahun dimana kuartal kesatu sampai dengan ketiga belanja pemerintah daerah cenderung masih rendah dan kemudian naik secara signifikan pada kuartal terakhir. Pola tersebut kemudian mengakibatkan belanja daerah tidak optimal di akhir tahun. Hal ini terlihat pula dari pola simpanan pemda di perbankan, dimana kuartal kesatu hingga kuartal ketiga pergerakan simpanan pemda cenderung naik dan baru mulai turun pada kuartal terakhir terutama di bulan Desember. Menumpuknya simpanan pemda hingga kuartal 3 tentunya sangat disayangkan, mengingat uang tersebut seharusnya dapat segera dibelanjakan sehingga masyarakat dapat secara lebih cepat merasakan manfaat dari belanja daerah, khususnya pelayanan publik.

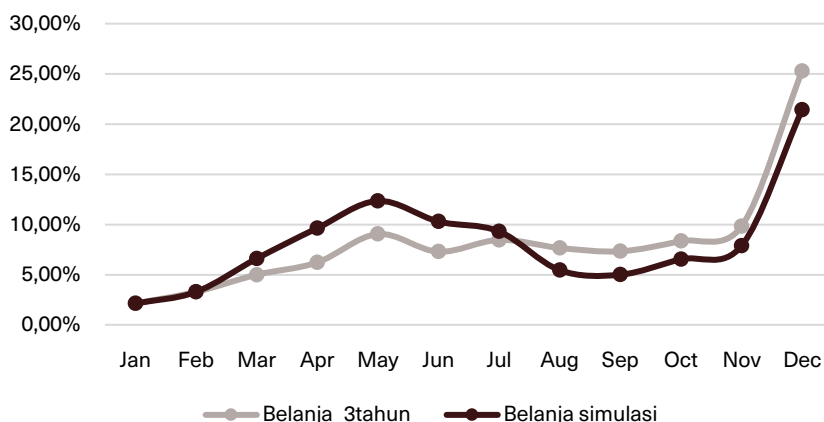
Melihat kecenderungan pola tersebut, studi ini mencoba untuk melakukan analisis terkait perubahan pola belanja daerah sebagai dampak dari perubahan pada pola penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Metode yang digunakan untuk melakukan analisis ini adalah metode *Vector Autoregression (VAR)*, yang merupakan metode untuk memperlihatkan hubungan antar variabel berdasarkan nilai dari masa lampau (lag) dari variabel itu sendiri serta nilai masa lampau dari variabel lain yang ada dalam model. Informasi dari masa lampau tersebut memungkinkan metode VAR melalui uji *Impulse Response Function* untuk dapat memproyeksikan dampak dari sebuah *shock* atau perubahan pada suatu variabel terhadap variabel tersebut dan juga variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan data bulanan TKDD dan belanja daerah dari bulan Januari 2018 hingga Desember 2020. Metode Augmented Dickey Fuller (ADF) digunakan untuk melakukan Uji stasioneritas, dengan hasil seluruh variabel stasioner pada level. Lag yang digunakan adalah lag 2 dengan nilai Akaike Information Criterion (AIC) yang paling minimum berada pada lag tersebut. Hasil uji stabilitas menunjukkan bahwa estimasi VAR memenuhi kondisi stabilitas

Hasil uji kausalitas VAR menunjukkan bahwa TKDD mempunyai hubungan satu arah dengan belanja daerah, yang berarti TKDD di masa lampau mempengaruhi belanja daerah saat ini, tapi tidak berlaku sebaliknya. Hasil dari impulse response menunjukkan bahwa dampak terbesar dari shock atau perubahan pada TKDD terhadap belanja daerah terjadi pada waktu $t+2$ atau 2 bulan dari setelah terjadinya shock. Dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait dampak dari perubahan pola penyaluran TKDD terhadap belanja daerah, dilakukan simulasi dengan memberikan shock secara berulang. Pada bulan Februari dan Maret diberikan shock secara positif berupa relaksasi/penambahan penyaluran TKDD dengan jumlah masing-masing sebesar Rp20 Triliun dan Rp15 Triliun, serta diberikan shock negatif berupa penurunan penyaluran TKDD pada bulan Juni dan Juli masing-masing sebesar Rp27 Triliun dan pada bulan November sebesar Rp25 Triliun. Hasil simulasi tersebut menunjukkan terdapat perubahan pola penyaluran TKDD dan pola belanja daerah sebagaimana grafik di bawah ini.

● ● Tabel Perbandingan Rata-rata pola Penyaluran TKDD dengan Hasil Simulasi



● ● Tabel Perbandingan Belanja Daerah 3 tahun terakhir dengan Hasil Simulasi



Berdasarkan hasil simulasi, pada 3 tahun terakhir rata-rata penyaluran TKDD hingga semester 1 sebesar 51,06%, sementara penyaluran TKDD hingga semester 1 pada hasil simulasi dengan adanya penambahan shock tadi adalah sebesar 62,42%. Sebagai dampak dari perubahan TKDD tersebut, pola belanja daerah mengalami pergeseran dimana realisasi belanja sampai dengan semester 1 dari hasil simulasi adalah sebesar 44,33%, lebih besar dari rata-rata realisasi belanja sampai dengan semester I di 3 tahun terakhir sebesar 33,02%. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian shock pada TKDD dengan mengubah pola penyaluran TKDD yang kemudian berdampak terhadap perubahan pola belanja daerah, dimana terjadi percepatan realisasi belanja daerah. Percepatan realisasi belanja daerah ini tentunya akan mengurangi simpanan pemda di perbankan dan mempercepat penyediaan layanan untuk masyarakat. Untuk itu, mengubah pola penyaluran TKDD menjadi lebih besar di awal, berpotensi untuk mempercepat realisasi belanja di daerah.

Penulis : Adrian Kusuma Pratama